



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JLN. GUNUNG TUA/LANGGA PAYUNG KM.5 (Kompleks Gor)
Telp. (0635) 510489 E-mail : bpbdpaluta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waktu dan kesempatan hingga terselesaikannya Rancangan Awal Rencana Kerja 2025 ini.

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kerja ini memuat rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Awal Kerja Tahun 2025 ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam tiga bulan pertama dan merupakan acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Sehingga penyusunan Rencana Kerja dimaksud dapat terwujud dengan harapan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Gunung Tua, 2025
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA

LAIRAR RUSDI NASUTION, SSTP, MM
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP.198110092000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
 BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan I	 6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	11
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	13
3.3. Program dan Kegiatan.....	16
 BAB IV PENUTUP	 18

DAFTAR TABEL

.....*Halaman*

Tabel . 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara	6
Tabel . 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	15
Tabel . 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	20
Tabel . 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepengtingan Tahun 2025.....	22
Tabel 3.1	Prioritas Nasional dan Program Priorotas dalam Rancangan RKP Tahun 2025.....	23
Tabel . 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025	27
Tabel . 3.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025.....	27
Tabel . 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2025	33

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026 menjadi acuan dan merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada.

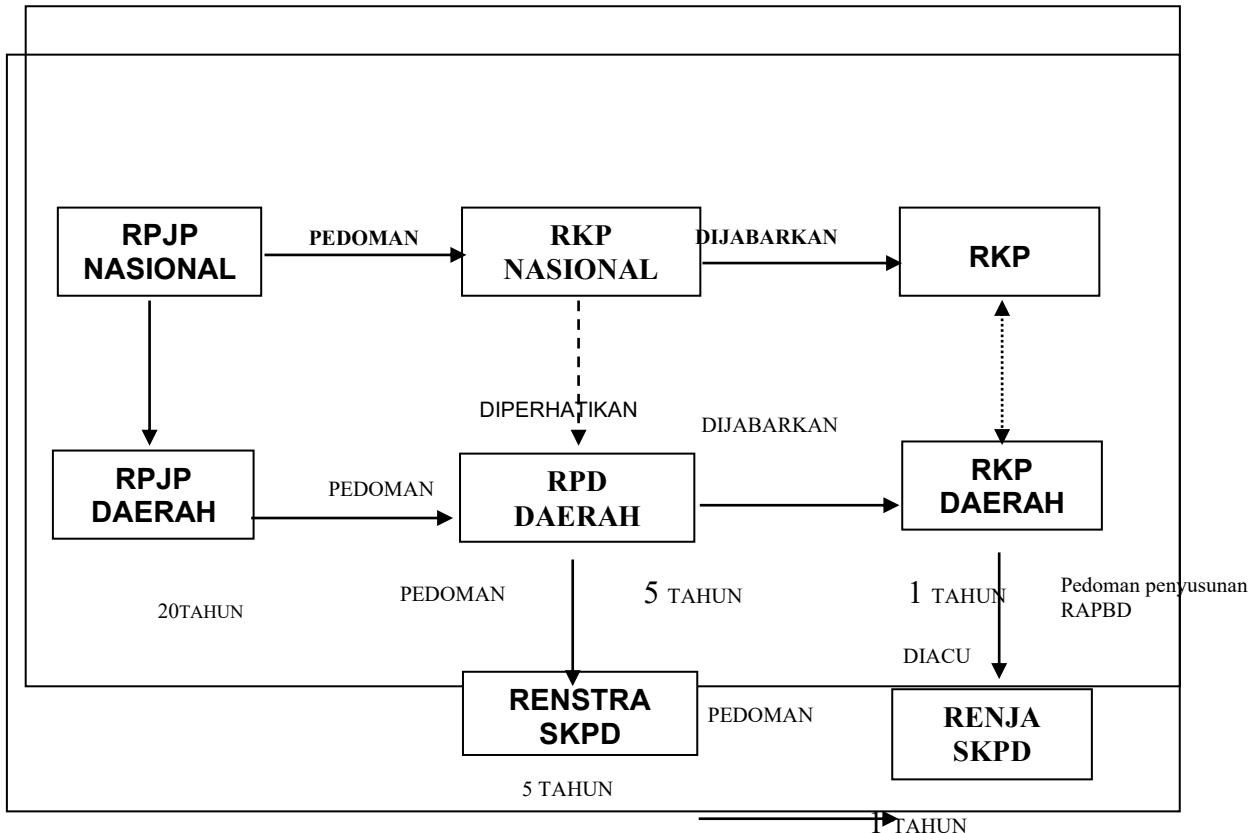
Rencana kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang ditargetkan untuk dicapai. Penetapan tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, sehingga Renstra ini sedapat mungkin merupakan strategi, kebijakan dan capaian program dalam RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2024-2026. Dalam Renstra ini termuat tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 disusun melalui proses penyusunan Renja sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Kaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatra Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pe,angunan menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintahan daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035 (Lembaran daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor Tahun 2015 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 41).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No 01 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah agar dapat menjamin keterkaitan dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan biro pengadaan barang jasa disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah tahun 2025.
2. Sebagai Pedoman dan Kerangka Acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring dan evaluasi di lingkungan BPBD.

b) Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja dilaksanakan Kabupaten Padang Lawas Utara 2025 didasarkan pada Renstra dilaksanakan Kabupaten Padang lawas Utara tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Timur 2024-2026, untuk mengetahui :

3. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu

Pelaksanaan Program/ kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efesiensi dan efektivitas.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada matrik analis berikut :

TABEL 2.1
Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renja Perangkat Daerah sd Tahun 2025
Kab. Padang Lawas Utara

KODE						Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan (Renja-Perangkat Daerah) tahun 2025	Prakiran Realisasi Capaian target renstra SKPD s/d tahun					
												Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)				
1						2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11={10/4}	
1	05	01	02			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja (Renja) yang disusun	5	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	1	dokumen	0,2
1	05	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5	Dokumen	3	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	3	dokumen	0,6
1	05	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi OPD	5	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	1	dokumen	3	dokumen	0,8
1	05	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi OPD	5	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	0	dokumen	2	dokumen	0,4
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1	05	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	OB	12	OB	12	OB	12	OB	1	12	OB	36	OB	3

1	05	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	3	dokumen	1	0	dokumen	4	dokumen	0,6
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	Bulan	10	Bulan	1	Bulan	0	Bulan	0	0	Bulan	10	Bulan	1,75
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya kebutuhan alat tulis	10	Jenis	50	jenis	3	Jenis	1	jenis	0,3	0	Jenis	51	jenis	6,3
1	05	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan dan Tangga	Tersediannya kebutuhan alat tulis	12	Bulan	0	Bulan	3	Bulan	0	Bulan	0	1	Bulan	1	Bulan	0,5
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah kertas yang digandakan	30	Jenis	30	jenis	4	Jenis	1	jenis	0,25	1	Jenis	32	jenis	2,13
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	30	Terbitan	50	Terbitan	5	Terbitan	1	Terbitan	0,2	1	Terbitan	52	Terbitan	3,5
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	Laporan	0,08	2	Laporan	15	Laporan	3
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya sarana surat menyurat	1200	Lembar	1000	Lembar	1200	Lembar	3700	Lembar	3,08	1200	Lembar	5.900	Lembar	3,08
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya arus listrik, jaringan telpon, air bersih dan sambungan internet	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	36	Bulan	3	1	Bulan	49	Bulan	3
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	jenis	0	jenis	2	jenis	2	jenis	1	0	jenis	2	jenis	0,2

1	05	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	12	Bulan	30	Bulan	12	Bulan	72	Bulan	6	2	Bulan	104	Bulan	6
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang dipelihara	12	Unit	10	Unit	10	Unit	45	Unit	4,5	4	Unit	59	Unit	3,75
1	05	03				program Penanggulangan Bencana															
1	05	03	2	01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota															
1	05	03	2	01	02	Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan	202	Orang	75	Orang	75	orang	225	Orang	3	0	Orang	300	Orang	1,11
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana															
1	05	03	2	02	06	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Terbentuknya desa tangguh bencana	10	Kawasan	5	Kawasan	0	Kawasan	10	Kawasan	0	0	Kawasan	15	Kawasan	1
1	05	03	2	02	09	Penyusunan rencana kontijensi	Terbentuknya desa tangguh bencana	0	Kawasan	0	Kawasan	0	Orang	5	Kawasan	0	0	Kawasan	5	Kawasan	0
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana															

1	05	03	2	03	03	Pencarian dan pertolongan dan evaluasi korban bencana kabupaten/kota	Penyelamatan dan evakuasi penduduk yang terkena bencana	0	Kegiatan	1	Kegiatan	5	kegiatan	2	Kegiatan	0,4	1	Kegiatan	4	Kegiatan	0
1	05	03	2	04		Penataan sistem dasar penanggulangan bencana															
1	05	03	2	04	03	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	3	Kegiatan	3	0	Kegiatan	4	Kegiatan	0,6
1	05	03	2	04	06	Penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota	5	Dokumen	0	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	1	1	Dokumen	5	Dokumen	0,8

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2025, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2024

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP 4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP 4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP 4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP 4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP 4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

Selain itu berdasarkan hasil penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, diketahui bahwa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dilakukan melalui:

- 1) Pelayanan informasi rawan yang meliputi:
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana.
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
 - b. Pembuatan Rencana Kontinjensi.
 - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi.
 - d. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana.
 - f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang meliputi:
 - a. Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis.
 - b. Respon cepat darurat bencana.
 - c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
 - d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - e. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

A. Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat teknis daerah kabupaten Padang Lawas Utara berupaya dapat melaksanakan tugas pengendalian dampak lingkungan dengan baik, untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan visi sebagai berikut: **“MENJADI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG TANGGUH, TANGGAP, DAN PROFESIONAL DALAM MENANGANI BENCANA ALAM DAN SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”**

Untuk mencapai visi tersebut ada 3 Misi yang ditetapkan yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan prima baik untuk internal organisasi maupun pelayanan kepada public;
2. Mewujudkan konsep penanggulangan yang tangguh, tanggap, dan profesional; dan
3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 3 (tiga) tahun kedepan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selaras dengan fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai acuan untuk mencapai tujuan yaitu :

“Mewujudkan keseimbangan alam dan sosial dalam pencegahan bencana berkelanjutan”.

Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode Tiga tahun ke depan.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan, sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Daerah. Sasaran terhadap tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
2. Menciptakan daerah yang tanggap dan tangguh dalam penanggulangan bencana daerah;
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan social di lingkungan sekitarnya;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah; dan
5. Tertanggulangnya Bencana alam dan social di kabupaten Padang Lawas Utara.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI					NALH E AKIP	TARGET			SUMBER DATA
1	2	3	4	5							2024	2025	2026	7
	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima di bidang penanggulangan bencana daerah.	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai evaluasi akip adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik	KOMPONEN	SUB KOMPONEN 1 KEBERADAAN	SUB KOMPONEN 2 KEBERADAAN	SUB KOMPONEN 3 KEBERADAAN	TOTAL BOBOT	62.10	64.87	69.87	74.87	TIM Evaluasi
						20%	30%	50%	100%					
					Perencana kinerja	6%	9%	15%	30%					
					pengukuran kinerja	6%	9%	15%	30%					
					pelaporan kinerja	3%	4,50	8%	15%					
					evaluasi akuntabilitas kinerja internal	5%	8%	13%	25%					
					nilai akuntabilitas kinerja	29	30	50	100					
			2. Nilai indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	indeks kepuasan masyarakat adalah hasil survei dari kegiatan survei kepuasan masyarakat/pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik	IKM= <u>total dari nilai persepsi perunsur</u> X nilai penimbang dibagi total unsur yang terisi						78	80	82	TIM Evaluasi
	Tujuan OPD: 1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, Mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana .	Sasaran OPD: Membantu masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	3. Presentase Penanggulangan n Bencana yang Di Tangani	Peraturan pemerintah Republik Indonesia no 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Bencana yang ditangani dibagi jumlah Kejadian bencana X 100%						100%	100%	100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menghadapi bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut disajikan Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD
3. koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. Program Penanggulangan bencana

A. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana

1. pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
2. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
3. pengembangan kapasitas Tim reaksi cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

B. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 2025 pada dasarnya akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara melalui kebijakan pembangunan. Adapun dalam Rencana Kerja (RENJA) ini belum dapat mengakomodir semua kebutuhan ideal yang dibutuhkan BPBD, terutama dalam hal kebutuhan sarana dan prasarana pendukung Bencana serta optimalisasi pemenuhan semua sub-kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun, dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, jujur, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi misi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradab.

Gunung Tua, 2025
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA

LAIRAR RUSDI NASUTION, SSTP, MM
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP.198110092000121002

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUH JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							3.743.153.661,00	4.184.971.488,00	3.712.498.960,00	-30.654.701,00						6.269.428.697,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.743.153.661,00	4.184.971.488,00	3.712.498.960,00	-30.654.701,00							6.269.428.697,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3.743.153.661,00	4.184.971.488,00	3.712.498.960,00	-30.654.701,00							6.269.428.697,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tersedianya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				3 Dokumen	3 Dokumen	2.040.636.561,00	2.207.455.588,00	1.951.223.760,00	2.325.948.427,00							4.366.584.988,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	1.409.600.961,00	1.426.447.588,00	1.387.923.260,00	-21.677.701,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PEGAWAI ASN	2.075.441.972,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.409.600.961,00	1.426.447.588,00	1.387.923.260,00	-21.677.701,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1.971.341.972,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		99.100.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13 Orang	13 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PEGAWAI ASN	23.143.016,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			23.143.016,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				381 jenis	381 jenis	246.606.800,00	262.674.200,00	203.811.700,00	-42.795.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		338.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1.995.800,00	1.995.800,00	4.125.300,00	2.129.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	19.603.000,00	35.671.000,00	76.639.700,00	57.036.700,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	9.019.000,00	9.018.400,00	3.040.200,00	-5.978.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00	4.470.500,00	-13.029.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				315 Laporan	315 Laporan	198.489.000,00	198.489.000,00	115.536.000,00	-82.953.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36 Laporan	36 Laporan	287.818.800,00	316.723.800,00	172.978.800,00	-114.840.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		1.855.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.900.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230.578.800,00	259.483.800,00	115.738.800,00	-114.840.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.800.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5 Unit	5 Unit	86.610.000,00	186.610.000,00	171.510.000,00	84.900.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	86.610.000,00	186.610.000,00	171.510.000,00	84.900.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	1.702.517.100,00	1.977.515.900,00	1.761.275.200,00	200.326.609,00							1.902.843.709,00		
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	279.593.300,00	279.593.300,00	0,00	-279.593.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	kabupaten padang lawas utara		300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRb) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				100% Dokumen	100% Dokumen	279.593.300,00	279.593.300,00	0,00	-279.593.300,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	tersedianya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				15 Kawasan	15 Kawasan	1.309.281.000,00	1.559.280.000,00	1.659.279.600,00	349.998.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	masyarakat		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				12 Kawasan	12 Kawasan	1.309.281.000,00	1.559.280.000,00	1.659.279.600,00	349.998.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	78.642.900,00	88.643.000,00	98.186.000,00	19.543.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	kabupaten padang lawas utara		52.843.709,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	12 Dokumen	78.642.900,00	88.643.000,00	98.186.000,00	19.543.100,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			52.843.709,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	34.999.900,00	49.999.600,00	3.809.600,00	-31.190.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang didelegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	34.999.900,00	49.999.600,00	3.809.600,00	-31.190.300,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								3.743.153.661,00	4.184.971.488,00	3.712.498.960,00	-30.654.701,00						6.269.428.697,00		